

## **DISKOMINFO PROVINSI JAMBI GELAR RAKOR PPID DEMI WUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

**Sekda : OPD Harus Sediakan Informasi Publik Secara Berkesinambungan**



Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kominfo Provinsi Jambi menggelar Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rabu, (28/8) bertempat di Grand Hotel Jambi.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan diadakannya acara tersebut adalah agar para OPD/PPID Pembantu menyadari betapa

pentingnya penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan dan disediakan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Drs. H.M. Dianto, M.Si, dalam sambutannya menegaskan kepada seluruh OPD/PPID Pembantu agar menyediakan informasi publik secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi.

Dianto menambahkan bahwa Provinsi Jambi telah berupaya menjawab tantangan keterbukaan informasi publik di era digital yaitu dengan menyediakan informasi publik melalui website PPID Provinsi Jambi ([www.ppid.jambiprov.go.id](http://www.ppid.jambiprov.go.id)). Hal ini dilakukan untuk memangkas waktu bagi pemohon informasi yang ingin memperoleh akses informasi publik sehingga pada akhirnya pelayanan informasi menjadi sedemikian cepat, tepat, dan sederhana.

"Sampai saat ini masih banyak OPD/PPID Pembantu yang belum menyediakan informasi publik melalui website PPID Provinsi Jambi," ungkapnya.

"Akibatnya, Provinsi Jambi menyandang predikat Provinsi Kurang Informatif, hal ini berdasarkan penilaian monev yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2018," ucapnya.

Selain itu, Dalam audit kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Jambi mendorong agar PPID Provinsi Jambi segera mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU KIP.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda juga menekankan agar seluruh OPD/PPID Pembantu untuk memberikan usulan daftar informasi yang dikecualikan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

“Saya tegaskan kepada seluruh OPD/PPID Pembantu agar segera menyediakan informasi publik secara berkesinambungan melalui website PPID Provinsi Jambi serta mengusulkan daftar informasi yang dikecualikan,” tegasnya.

Sejauh ini, ada 19 dari 35 OPD yang telah memberikan usulan daftar informasi yang dikecualikan kepada Dinas Kominfo Provinsi Jambi.

Sekda menekankan kepada OPD yang belum memberikan usulan tersebut agar segera dibuat, hal ini wajib dan penting dikarenakan menjadi tahapan untuk melakukan uji konsekkuensi informasi yang dikecualikan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 UU KIP.

